



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL REVIU ATAS SELF-ASSESSMENT AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023 PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU



INSPEKTORAT UTAMA

Nomor : 12.k/LHR/XI-XI.2/01/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
1. Pendahuluan	1
2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	1
3. Hasil Reviu	2
4. Rekomendasi	3

**LAPORAN HASIL REVIU
ATAS
SELF-ASSESSMENT AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023
PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama (Itama) telah melakukan Reviu atas Hasil *Self-Assessment* AKIP Tahun 2023 pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Reviu dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen Akuntabilitas Kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Reviu bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut.

- a. BPK telah memiliki ukuran kinerja individu yang mengacu kepada indikator kinerja satuan kerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai - Indikator Kinerja Individu (SKP-IKI). SKP-IKI mengacu pada PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Pencapaian kinerja individu pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah dimonitor secara berkala oleh atasan langsung.

Saat ini, penyusunan SKP-IKI Tahun 2023 dalam proses penyesuaian dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM).

- b. Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 telah menginformasikan:
 - 1) kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
 - 2) upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja);

- 3) perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
- 4) perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 5) perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- 6) efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (tidak hanya efisiensi keuangan);
- 7) anggaran maupun realisasi yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran atau kinerja tertentu.

3. Hasil Reviu

Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mendapatkan nilai sebesar **91,40** dengan predikat “AA” yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Sangat Memuaskan**”, yaitu pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah terwujud *good governance*, dan telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan efisien (*reform*). Rincian hasil reviu adalah sebagai berikut.

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	27,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	23,00
Total		100,00	91,40
Predikat			AA

Nilai AKIP Tahun 2023 tidak diperbandingkan dengan nilai tahun sebelumnya karena terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaiannya.

Lebih lanjut, uraian hasil reviu AKIP Tahun 2023 pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai berikut.

a. Perencanaan Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah memiliki dokumen perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, indikator kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound* (SMART) dan cukup, serta menggunakan penjenjangan kinerja hingga ke level individu dengan logis. Perencanaan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil organisasi yang berkesinambungan dan selalu dilakukan evaluasi. Perencanaan penganggaran BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah mendukung kinerja dimana proses penyusunan, penelitian, dan reviunya telah menggunakan aplikasi Proses RKA.

b. Pengukuran Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah memanfaatkan portal kolaborasi untuk penyampaian data/dokumen dan menggunakan aplikasi PRISMA untuk pengukuran kinerja yang dimonitor secara triwulanan. Selain itu, terdapat upaya inovatif pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang layak menjadi percontohan antara lain Penerapan Panduan atas Penyusunan LHP LKPD untuk Meminimalkan Kesalahan Penulisan LHP. Upaya inovatif telah ditetapkan dengan Nota Dinas Kepala Direktorat Perencanaan

Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) Nomor 757/ND/XII.1/12/2022 tanggal 16 Desember 2022.

c. Pelaporan Kinerja

Penyusunan LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 telah mempedomani Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 dan Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK Nomor 38/ND/XII.1/01/2023. Evaluasi dalam LAKIN telah dimanfaatkan untuk menyempurnakan perencanaan kinerja tahunan tahun berikutnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memadai yang setiap tahun mengikuti kegiatan Forum Pengelola Renstra dalam rangka mengevaluasi indikator dan target kinerja serta mengikuti *sharing knowledge* untuk meningkatkan kinerja.


4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, Itama merekomendasikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu agar berkoordinasi dengan Biro SDM untuk menyempurnakan *cascading* kinerja dari satuan kerja hingga ke level individu sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Itama menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Terhadap hasil revidi ini, Itama mengharapkan agar Saudara beserta jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana termuat di laporan ini.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Penanggung Jawab

Yusnadewi
 NIP 197012021996032001

